

## **ABSTRAK**

*Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Pasar Modal. Tesis : Arga Indra Wirawan, 2016, Pembimbing Prof. Dr. Eko Sopyono, SH., MH. dan Dr. Hj. Sukarmi, SH., M.Hum, Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.*

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum pidana, kebijakan hukum pidana khususnya dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di bidang pasar modal saat ini dan di masa yang akan datang. (*ius constitutum* dan *ius constituendum*).

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dimana penulis berusaha menjelaskan dan menganalisa sejauh mana kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan penerapannya dengan mengacu pada hukum *ius constitutum* dan *ius constituendum*.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah : (1) Hukum pidana positif saat ini tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana, korporasi dikenal sebagai subjek hukum pada undang-undang khusus di luar KUHP. Formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di rasa tepat karena sudah berpandangan pada Teori Identifikasi, akan tetapi dalam tahap aplikasi terdapat kendala karena tidak adanya pedoman pelaksanaan. (2) RUU KUHP saat ini telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum, dengan berpegang pada teori identifikasi (*identification theory*) dimana perbuatan pengurus dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Seperti halnya di Amerika dan Australia, kedua negara ini juga sama-sama mengedepankan teori identifikasi dan penerapannya tidak jauh berbeda penerapannya di Amerika dan Indonesia. Akan tetapi di Amerika dan Australia, kesalahan korporasi tidak hanya diidentikkan dengan Pengurus Korporasi, tapi pegawai bawahan yang dapat membuat keputusan (kebijakan) pun diidentikkan dengan tindakan korporasi selama dalam lingkup korporasi dan bermanfaat bagi korporasi.

Kata Kunci ; Kebijakan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang

## **ABSTRACT**

*Corporate Criminal Liability Policy in Money Laundering in the Capital Market. Thesis :* Arga Indra Wirawan, 2016, counsellor Prof.Dr.Eko Suponyono, SH., MH. and Dr.Hj.Sukarmi, SH., M.Hum, Graduate Program in Ismlamic University of Sultan Agung Semarang.

This research purpose to determine and analyzethe politics of criminal law, criminal law policy, especially in the corporate criminal liability in the field of money laundering capital markets today and the future. (*ius constitutum* dan *ius constituendum*).

This research method using normative juridical approach and specification of descriptive analysis where the authors attempt to explain and analyze the extent to which corporate criminal liability policy in Indonesia and its application by reference of the law *ius constitutum* and *ius constituendum*.

The findings in this study are : (1) Positive criminal law doesn't currently recognize corporations as subjects of criminal law, korporasi known as the law on the subject of special law outside in the Criminal Code. Formulation of criminal responsibility to corporations deemed appropriate because it holds the identification theory, but there are obstacles in the application stage because of the absence of implementation guidelines. (2) Criminal Code draft has now admitted the corporation as a legal subject, by adhering to the theory of identification (*identification theory*) which acts as the board considered acts of the corporation itself. Just as in the United an Australia, the two countries is also equally prioritize the identification theory and its application isn't much different in the United States and Indonesia.

*Keywords: Policy, Corporate Criminal Liability, Money Laundering*